

MEMAHAMI KETIMPANGAN INFORMASI DI ERA GLOBALISASI

Dra.Kartini, MA

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Gajah Putih Takengon

Email : abdi.bardan@gmail.com

Abstract

This article will discuss about understanding information inequality in society when entering the era of globalization. Indeed, with the advancement of such a great communication technology, then each member of the world community can work together, compete and compete with each other freely. Geographical isolation and distant distances are no longer an obstacle. From an economic point of view, after the ASEAN free market (AFTA), we also witnessed the Asia-Pacific free market (APEC) and the last free world market (WTO). But because the power of capital, human resources, management, technology and industry controlled by the North countries, resulting in unfair competition. In this case, especially Indonesia, let alone for world level, ASEAN level we are still difficult to win the competition. So also in terms of culture, various ideologies, understandings and lifestyle will affect each other quickly, quickly change the community order. Once again, although theoretically all members of the world community influence each other, but due to unbalanced forces, which will dominate and impose its view is the Western countries. As an illustration, if we go to Europe or America, we can be sure we will not be able to watch television shows from Indonesia. But instead if we open any Indonesian TV station, we will easily get the events of Western products.

Keywords: Inequality, Information, Globalization

هذا المقال سوف يناقش حول فهم عدم مساواة المعلومات في المجتمع عند دخول عصر العولمة. في الواقع، مع تقدم تكنولوجيا الاتصالات بصفة كبيرة، ثم كل عضو في المجتمع الدولي أن يتعاون في العمل، والتنافس والتفاعل بحرية. الحدود والمسافات الجغرافية وبصرف النظر لم يعد عائقا. ومن منظور اقتصادي، بعد السوق الحرة (AFTA)، ونحن نرى أيضا السوق الحرة في آسيا والمحيط الهادئ (إبيك) والسوق الحرة العالمية الماضي (WTO) ولكن بسبب قوة رأس المال والموارد البشرية، وإدارة والتكنولوجيا والصناعة التي تسيطر عليها دول الشمال، نتيجة المنافسة تحدث غير متوازنة في هذه الحالة، وخاصة إندونيسيا، ناهيك عن مستوى العالم، ومستوى آسيا، فإننا لا نزال نجد للفوز في المنافسة. وبالمثل، من حيث الثقافة، مجموعة متنوعة من أيديولوجية وفهم ونمط الحياة تؤثر على بعضها البعض بسرعة، وتتغير بسرعة، وكذلك المجتمع مرة أخرى، على الرغم من الناحية النظرية فقط تؤثر على كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، ولكن لأن القوات ليست متوازنة، والتي سوف تسيطر وتكره نظرها هي الدول الغربية. ومثال على ذلك، إذا ذهبنا إلى أوروبا أو أمريكا، فمن المؤكد أننا لن نكون قادرا على مشاهدة البرامج التلفزيونية من

اندونيسيا. لكن على خلاف ذلك إذا أردنا فتح محطة التلفزيون الاندونيسية في أي مكان، بسهولة سوف نحصل على أحداث المنتجات الغربية. الكلمات الأساسية: عدم المساواة، والمعلومات، والعولمة

PENDAHULUAN

Pengertian Globalisasi

Kata globalisasi berasal dari “global” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti secara keseluruhan. Globalisasi berarti *suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak nampak lagi adanya batas-batas yang mengikat secara nyata*. Dalam keadaan global, tentu apa saja dapat masuk sehingga sulit untuk disaring atau dikontrol. Terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, makna globalisasi memiliki dimensi luas dan kompleks yaitu bagaimana suatu negara yang memiliki batas-batas teritorial dan kedaulatan tidak akan berdaya untuk menepis penerobosan informasi, komunikasi dan transportasi yang dilakukan oleh masyarakat di luar perbatasan.

Globalisasi dalam arti literal adalah sebuah perubahan sosial, berupa bertambahnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemennya yang terjadi akibat *transkulturasi* dan perkembangan teknologi dibidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Kultur asing yang masuk bukanlah faktor utama.¹

Demikian pula pendapat beragam yang dikemukakan para ahli berkaitan

dengan konsep Globalisasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Malcolm Waters

Globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial-budaya menjadi kurang penting, yang terjelma di dalam kesadaran orang.

b. Emmanuel Ritcher

Globalisasi adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpecah-pecah dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia.

c. Thomas L. Friedman

Globalisasi memiliki Dimensi Ideologi dan Teknologi. Dimensi Ideologi, yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan Dimensi Teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia.

d. Princeton N. Lyman

Globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan.

e. Leonor Briones

Demokrasi bukan hanya dalam bidang perniagaan dan ekonomi namun juga mencakup globalisasi terhadap institusi-institusi demokratis, pembangunan sosial, hak asasi manusia dan pergerakan warga.

¹Amri Marzali, *Antropologi & Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 198.

Proses Globalisasi

Perkembangan yang paling menonjol dalam era globalisasi, antara lain globalisasi informasi seperti berita, televisi dan bahan siaran. Demikian juga dalam bidang ekonomi (perdagangan), teknologi, wawasan, perilaku dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.² Dalam perkembangan global lainnya (*global trends*), misalnya dalam bidang kependudukan (migrasi dan lapangan kerja internasional), gejala lingkungan hidup (pemanasan global), gaya hidup, serta politik ekonomi seperti munculnya masyarakat ekonomi, wilayah pertumbuhan lintas negara (APEC, AFTA, SIJORI, dan sebagainya).

Fenomena Globalisasi

Fenomena globalisasi yang sedang dihadapkan oleh umat manusia semenjak abad ke-20 dapat ditandai oleh beberapa hal, di antaranya adalah :

- a. *Arus Etnis* ditandai dengan mobilitas manusia yang tinggi dalam bentuk imigran, turis, pengungsi, tenaga kerja dan pendatang. Arus manusia ini telah melewati batas-batas teritorial negara.
- b. *Arus Teknologi* ditandai dengan mobilitas teknologi, munculnya multinational corporation dan transnational corporation yang kegiatannya dapat menembus batas-batas negara. Dengan adanya teknologi komunikasi yang canggih

menimbulkan mobilitas penduduk menjadi cepat.³

- c. *Arus Keuangan* yang ditandai dengan makin tingginya mobilitas modal, investasi, pembelian melalui internet penyimpanan uang di bank asing.
- d. *Arus Media* yang ditandai dengan makin kuatnya mobilitas informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai peristiwa di belahan dunia seakan-akan berada di hadapan kita karena cepatnya informasi.
- e. *Arus Ide* yang ditandai dengan makin derasnya nilai baru yang masuk ke suatu negara. Dalam arus ide ini muncul isu-isu yang telah menjadi bagian dari masyarakat internasional. Isu-isu ini merupakan isu internasional yang tidak hanya berlaku di suatu wilayah nasional negara.

Berdasarkan fenomena yang nampak pada globalisasi, dapat dijumpai adanya tanda-tanda yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari tentang globalisasi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya perdagangan global.
- b. Meningkatnya aliran modal internasional, diantaranya investasi langsung luar negeri.
- c. Meningkatnya aliran data lintas batas, seperti penggunaan internet, satelit komunikasi dan telepon.
- d. Adanya desakan berbagai pihak untuk mengadili para penjahat perang di Mahkamah Kejahatan

²Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 159.

³Dedy Mulyana, *Komunikasi Pembangunan, Pendekatan Terpadu*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), h. 167.

- Internasional (*International Criminal Court*), dan adanya gerakan untuk menyerukan keadilan internasional.
- e. Meningkatnya pertukaran budaya (*cultural exchange*) internasional, misalnya melalui ekspor film-film *Hollywood and Bollywood*.
 - f. Menyebarnya paham multikulturalisme dan semakin besarnya akses individu terhadap berbagai macam budaya.
 - g. Meningkatnya perjalanan dan turisme lintas negara.
 - h. Berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global.
 - i. Berkembangnya sistem keuangan global.
 - j. Meningkatnya aktivitas perekonomian dunia yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional.
 - k. Meningkatnya peran organisasi-organisasi internasional, seperti WTO, WIPO, IMF, yang berurusan dengan transaksi-transaksi internasional.

Aspek-Aspek Globalisasi

- a. Aspek Ekonomi
Mengacu kepada makin menyatunya unit-unit ekonomi di dunia ke dalam satu unit ekonomi dunia.
- b. Aspek Kebudayaan dan Keagamaan
Mengacu kepada gagasan-gagasan baru yang datang dari seluruh dunia, terutama masyarakat negara maju yang berangsur-angsur mengubah pola gagasan budaya dan agama asli suatu bangsa.
- c. Aspek Teknologi

Adanya perkembangan teknologi informasi yang pada akhirnya menyatukan dunia menjadi sebuah tempat tanpa batas.

- d. Aspek Demografi
Merujuk kepada penghijrahan manusia yang berlaku sehingga merubah pola demografi sebuah negara.

Trens Era Globalisasi

Era globalisasi yang akan terus berlanjut dalam abad 21, pada mulanya merupakan wujud perubahan dan perkembangan sistem informasi, telekomunikasi serta transportasi dengan fenomena yaitu dapat mempersingkat jarak dalam hubungan antar negara atau antar wilayah dalam batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan demikian, telah dimungkinkan oleh terjadinya kemajuan-kemajuan yang cepat dan menakjubkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Tentu saja kemajuan-kemajuan Iptek tersebut dapat dicapai berkat adanya kemampuan ekonomi dunia melalui aliran modal tanpa batas untuk mendukungnya. Sebagaimana yang sedang kita saksikan, adanya keterkaitan antara kedua faktor Iptek dan kemampuan ekonomi ini telah menimbulkan perubahan-perubahan yang cepat dan luar biasa di seantero dunia, serta tingkat kompetisi yang tinggi, dan tidak terkecuali pada masyarakat Indonesia.

Adapun beberapa trens tentang globalisasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Perubahan Akseleratif*, yaitu merupakan perubahan yang sangat

- cepat dalam segala bidang terutama yang berhubungan dengan interdependensi atau ketergantungan dengan ekonomi, teknologi informasi dan komunikasi di antara negara-negara di dunia.
- b. *Aliran Modal Tanpa Batas*, yaitu tumbuhnya iklim investasi yang mencakup berbagai produk. Banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan ekspansi ke negara-negara lain untuk mendapatkan komponen-komponen produk yang tidak lagi dari anak perusahaannya, tapi dapat juga dari perusahaan-perusahaan lain sehingga terwujud produk barang jadi.
 - c. *Ekonomi Pengetahuan*, yaitu bahwa globalisasi telah membawa hubungan ekonomi antar bangsa yang ditandai saling ketergantungan antara negara-negara maju dan negara berkembang dengan segala implikasi yang ditimbulkannya. Hal ini menjadi kajian ilmu pengetahuan bagi para akademisi, ekonom, perumus kebijakan baik pemerintah maupun dunia usaha.
 - d. *Hiper Kompetisi*, yaitu segala daya upaya yang dilakukan baik dari dunia usaha, dunia industri maupun pemerintah yang selalu berkompetisi untuk memperoleh simpati dan segmen pasar yang sebanyak-banyaknya. Pemanfaatan media komunikasi dan informasi sangat gencar dalam publikasi untuk menawarkan produk-produk unggulan yang berkualitas dengan segala kelebihanannya sesuai dengan trens yang ada di dalam masyarakat.
 - e. *Global dan Kompleks*, yaitu segala hal yang terkait dengan transnasional produk telah terjadi saling ketergantungan yang memerlukan tingkat manajemen tinggi dan kompleks. Oleh sebab itu, globalisasi telah memberikan implikasi analisis pemikiran yang *integrated* dan komprehensif

Tantangan Globalisasi

Tantangan nyata pada era globalisasi adalah semakin kompleksnya berbagai bidang kehidupan karena adanya teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi yang membawa pengaruh terhadap berbagai nilai dan wawasan masyarakat internasional. Tantangan globalisasi yang mendasar dan akan dihadapi, antara lain sebagai berikut :

- a. *Sikap Individualisme*, yaitu munculnya kecenderungan mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan bersama, memudarkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial, musyawarah mufakat, gotong royong dan sebagainya.
- b. *Apresiasi Generasi Muda*, yaitu banyaknya generasi muda yang sudah melupakan para pejuang dan jati diri bangsanya dengan fenomena baru yaitu lebih tahu dan mengidolakan artis, bintang-bintang film, pemain sepak bola asing yang ditiru dengan segala macam aksesorisnya.
- c. *Pandangan Kritis terhadap Ideologi Negeranya*, yaitu banyaknya masyarakat yang sudah acuh tak acuh terhadap ideologi atau falsafah

- negaranya. Mereka sudah tidak tertarik lagi untuk membahasnya bahkan lebih cenderung bersikap kritis dalam operasionalnya dengan cara membanding-bandingkan dengan ideologi lain yang dianggapnya lebih baik.
- d. *Diversifikasi Masyarakat*, yaitu munculnya kelompok-kelompok masyarakat dengan profesi tertentu yang terus berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan guna mencapai tingkat kesejahteraan yang bertaraf internasional (mengglobal).
 - e. *Keterbukaan Yang Lebih Tinggi*, yaitu tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang lebih mengedepankan pendekatan dialogis, demokratisasi, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien.

Pelaku Atau Subjek Globalisasi

Para pelaku atau subjek dari globalisasi yang berperan dalam tumbuh-kembangnya tatanan dunia global, dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Negara-negara yang dipetakan secara *dikotomis*, yaitu negara-negara besar dan negara-negara kecil, negara-negara maju dan negara-negara berkembang, negara-negara yang kuat dan yang lemah secara ekonomi, negara-negara yang berdiri sendiri atau yang bergabung dengan negara lain, dan lain sebagainya.
- b. Organisasi-organisasi antar pemerintah (IGO atau International-Governmental Organizations), seperti ASEAN, NATO, European Community dan lain sebagainya.
- c. Perusahaan internasional yang dikenal dengan Multinational Corporation (MNC) atau Transnational Corporation atau Global Firms. Perusahaan-perusahaan ini dengan modalnya yang besar dan bersifat deterritorialis meluaskan jaringannya ke segala penjuru dunia. Pemerintah, pada khususnya negara-negara berkembang merasa perlu mendapatkan modal dan teknologinya. Fenomena pengaruh George Soros terhadap kebijakan politik global merupakan contoh dari peran perusahaan internasional dalam percaturan politik global.
- d. Organisasi a.internasional atau transnasional yang non pemerintah (INGO, International Non-Governmental Organizations) seperti Palang Merah Internasional di dirikan tahun 1867, Workingmen's Association (Sosialist International) tahun 1860-an, International Women's League for Peace and Freedom. Organisasi konvensional seperti: Vatikan, Dewan Gereja-gereja Sedunia, Rabbatul Islamiyah. Yang modern seperti Amnesty International, Green-Peace International, World Conference on Religion and Peace, World Federation of United Nations Associations, Trans-Parency International, Worldwatch, Human Rights Watch dan Refugee International. Organisasi global ini lebih tepat disebut aktivis profesional. Pendapat umum dan

- kebijakan dunia ternyata banyak sekali dipengaruhi oleh organisasi aktivis ini. Gagasan-gagasan mereka banyak disalurkan melalui media massa elit dunia, seperti *International Herald Tribune*, *The Guardian*, *Times* dan *The Economist*.
- g. Organisasi-organisasi non formal, rahasia dan setengah rahasia. seperti: mafia, teroris, pembajak, penyelundup, preman global, tentara bayaran, hacker komputer dan mungkin juga organisasi semacam Al-Qaeda.

Dampak Globalisasi

Globalisasi telah menimbulkan dampak yang sangat berarti dalam dimensi kehidupan manusia. Globalisasi merupakan proses internasionalisasi seluruh tatanan masyarakat modern. Pada awalnya ini hanya ada pada tataran ekonomi, namun dalam perkembangannya cenderung menunjukkan keragaman. Malcolm Waters mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) dimensi proses globalisasi, yaitu: Globalisasi Ekonomi, Globalisasi Politik dan Globalisasi Budaya.

Dari segi dimensi globalisasi budaya, muncul beberapa jenis space atau lukisan, seperti: *emospace*, *technospace*, *finanspace*, *mediaspace*, *ideospace* dan *sacrispace*. Dengan demikian, universalisasi sistem nilai global yang terjadi dalam dimensi kebudayaan telah mengaburkan sistem nilai (*values system*) kehidupan manusia, khususnya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam menghadapi tahun era pasar bebas.

Berikut adalah dampak globalisasi diberbagai bidang:

- a. **Ekonomi**, yaitu terbentuknya masyarakat global yang tidak lagi tergantung batas-batas wilayah. Dalam globalisasi bidang ekonomi telah terjadi perdagangan internasional pasar bebas, dibentuknya kerjasama regional, bilateral, maupun multilateral.⁴ Berdirinya organisasi World Bank, *World Trade Organization*, *Asian Free Trade Area* dan lain-lain.
- b. **Ideologi**, a. yaitu timbulnya dua ideologi besar yang menguasai dunia (Liberal dan Sosialis), di mana keduanya saling bertentangan. Ideologi Liberal menganut paham kebebasan untuk tiap individu merupakan jalan mencapai kebahagiaan, sementara ideologi Sosialis mengekang kebebasan rakyat untuk mencapai masyarakat yang makmur. Dengan globalisasi ideologi, berdampak luas terhadap upaya-upaya suatu negara dalam mewujudkan sistem politik, ekonomi maupun sosial budayanya.
- c. **Politik**, yaitu pengaruh globalisasi pada sistem politik di berbagai negara yang berkembang seperti sistem politik demokrasi Liberal, demokrasi Pancasila, Sosialis, Komunis dan sebagainya. Salah contohnya di Indonesia, yaitu terjadinya dinamika ketatanegaraan sistem politik yang mula-mula berbentuk demokrasi liberal, kemudian menjadi demokrasi

⁴T. May Rudy, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 211.

terpimpin dan akhirnya menjadi demokrasi pancasila yang dianut hingga sekarang ini.

- d. **Hankam**, yaitu adanya upaya-upaya setiap negara dalam mempertahankan kedaulatan negaranya melalui pembuatan sistem persenjataan maupun pemberdayaan rakyat dan tentaranya. Globalisasi bidang Hankam yang pernah dirasakan masyarakat dunia, yaitu dengan dibentuknya pakta pertahanan NATO, SEATO, WARSAWA, dan sebagainya. Dalam bidang hankam, negara Indonesia selain memperkuat berbagai sistem persenjataan di darat, udara dan laut juga melakukan upaya-upaya keamanan rakyat semesta dan kedaulatan nasional. Negara Indonesia dalam partisipasi menjaga keaman internasional, juga pernah mengirim Pasukan Garuda kebeberapa negara atas mandat Dewan Keamanan PBB.
- e. **Sosial**, yaitu banyaknya nilai-nilai dan budaya masyarakat yang mengalami perubahan dengan cara meniru atau menerapkannya secara selektif. Salah satu contoh perubahan di bidang sosial yaitu dengan hadirnya modernisasi di segala bidang kehidupan, terjadi perubahan ciri kehidupan masyarakat desa yang tadinya syarat dengan nilai-nilai gotong royong menjadi individual. Selain itu juga timbulnya sifat ingin serba mudah dan gampang (*instan*) pada diri seseorang. Pada sebagian masyarakat, juga sudah banyak yang mengikuti nilai-nilai budaya luar

yang dapat berpengaruh negatif maupun positif.

PEMBAHASAN

Memahami Ketimpangan Informasi

Untuk dapat memahami ketimpangan informasi dalam penulisan ini penulis mencoba menganalisis dari beberapa hasil penelitian, yaitu (Britz, 1998, 2004; Goulding, 2001; Haywood, 1995; Sweetland, 1993; Van Dijk, 1997, 2000). Sweetland (1993). Dimana dapat diketahui bahwa mereka mendefinisikan kemiskinan informasi sebagai bentuk kekurangan informasi: kurangnya akses informasi, informasi yang berlebihan dan informasi diri dikenakan kekurangan (misalnya keengganan untuk menggunakan perpustakaan); Van Dijk (1997, 2000) pemisahan informasi didefinisikan sebagai ketimpangan dalam kepemilikan dan penggunaan informasi dan komunikasi sumber-sumber di masyarakat tertentu, berpendapat bahwa ketidaksetaraan informasi yang beragam dan beberapa aspek yang dapat tumbuh sementara yang lain mengalami penurunan tajam; Britz dan rekan ketimpangan informasi didefinisikan berdasarkan kerangka kerja konseptual segi pengetahuan, informasi dan informasi infrastruktur.

Mereka kemudian mendefinisikan kemiskinan informasi sebagai situasi yang ada pada individu dan masyarakat, dalam konteks tertentu, tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, kemampuan atau materi berarti untuk mendapatkan akses yang efisien terhadap informasi, menafsirkan dan menerapkannya dengan tepat, hal itu lebih

lanjut ditandai oleh kurangnya informasi penting dan kurang berkembang infrastruktur informasi. Lievrouw dan Farb, setelah meninjau konseptualisasi orang lain dan istilah terkait, mengusulkan salah satu dari mereka. Mereka pertama berpendapat “ekuitas informasi” itu lebih berguna sebagai alat konseptual, “kesetaraan informasi” baik untuk penelitian ilmiah dan kebijakan pragmatis keputusan. Sedangkan ekuitas informasi adalah sebagai distribusi informasi yang wajar antar individu, kelompok, daerah, kategori, atau unit sosial lainnya, sehingga orang-orang memiliki kesempatan untuk mencapai apa saja yang penting atau bermakna bagi mereka dalam kehidupannya. Mereka akhirnya mengusulkan bahwa setiap analisis penggunaan akses informasi yang adil akan perlu memasukkan lima unsur utama dari ekuitas: akses, keterampilan, konten, nilai-nilai dan konteks. Seperti yang ada baru-baru ini, konsep terbaru dari fenomena pemisahan informasi tampaknya telah menunjukkan dua penelitian niat penting masyarakatnya. Yaitu, untuk memahami kompleksitas fenomena oleh conferring segi konotasi di atasnya, dan untuk merangkum ICT diperburuk perbedaan dengan menambahkan konsep teknologi dimensi.⁵

Memahami Penyebab Dari Pemisahan dan Ketimpangan Informasi

Artikel ini mencoba menelusuri penyebab dari pemisahan dan ketimpangan informasi dari tiga domain,

⁵<http://daniabreaker.blogspot.com/2011/02/memahami-ketimpangan-informasi-membuat.html>, di download tanggal 7 Januari 2012.

yakni domain ekonomi politik, domain cultural, domain kesadaran/pengertian. Kolonialisasi domain informasi mudah memenetrasi secara agresif kekuatan pasar dalam diseminasi informasi, kekuatan perlindungan atas hak kekayaan intelektual, akselerasi eksploitasi dari pengetahuan pribumi oleh perusahaan transnasional; semua ini merupakan penyebab utama pemisahan informasi pada masyarakat kontemporer dan memperburuk kemiskinan informasi pada beberapa bagian populasi.

Uji Kinerja Kekuatan Ekonomi Politik.

Di Amerika, perusahaan mengontrol secara ketat pembuatan informasi dan diseminasi menjadi secara khusus, lebih keras memperlihatkan untuk mengembangkan gabungan antara perusahaan media massa, periklanan, dan pembuat serta penjual informasi lainnya. Kesimpulannya bahwa ketika sektor prifat secara agresif menegaskan pasar informasi, hal itu juga secara aktif mencari persekutuan dengan pemerintahan dan akademika. Sementara di Inggris pengaruh yang menguasai prinsip-prinsip pasar pada kebijakan pemerintahan dan konvergensi dari industry media telah tercatat, menjadi tingkat yang luar biasa, untuk rupa pengeluaran social oleh miskin informasi pada masyarakat british.

Selain itu tingkat perbedaan dari pengembangan dan ketidakseimbangan relasi geopolitik juga merupakan penyebab utama untuk pemisahan informasi antar negara-negara. Oleh karena itu perbuatan hubungan internasional seringkali dapat berakibat besar terhadap pemisahan informasi

antara negara-negara; bantuan internasional dan skema kerjasama, misalnya, sering melekat pada kondisi yang mengharuskan negara-negara berkembang untuk membuka pasar telekomunikasi mereka, memperkenalkan mekanisme kompetitif, memperkuat hak kekayaan intelektual, Mengurangi pengeluaran publik, dll. Semua mengancam untuk lebih membahayakan kapasitas informasi negara-negara berkembang dalam jangka panjang

1. Social Konstruktivism.

Setiap individu dalam komunitas akan berbagi norma-norma sosial yang sama, kebiasaan dan bahkan bahasa. Norma-norma dan adat menentukan bagaimana individu anggota dalam dunia kecil mereka memahami informasi yang mereka terima, mereka juga menentukan ini anggota preferensi untuk saluran informasi dan akses metode, dan persepsi mereka nilai informasi.

Oleh karena itu, perbedaan budaya antara komunitas yang kurang beruntung dan arus utama masyarakat sering memimpin untuk keputusan informasi dari mantan dan dari terakhir: anggota dunia kecil dirampas jarang mencari informasi dari dunia luar, dan informasi berasal dari masyarakat yang lebih luas jarang menemukan jalan ke dunia kecil karena kelas menengah yang berorientasi isi dan paket. Dalam jangka panjang, para peneliti berpendapat, keputusan ini pasti menyebabkan kemiskinan informasi untuk bagian masyarakat yang kurang beruntung.

Pertukaran informasi antara dunia kecil (komunitas) dan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan pola interaksi antara orang dalam dan luar: kurangnya mengambil risiko, kerahasiaan, penipuan dalam mengkomunikasikan informasi dan keutamaan relevansi situasional. Sikap terhadap pertukaran dan penggunaan informasi ini memperkuat kemiskinan informasi dari (orang dalam) dengan memimpin mereka untuk mengabaikan sumber-sumber informasi lain yang dibuat oleh (orang luar).

Selain itu terdapat juga fenomena bahwa orang tidak selalu mengakses informasi yang bermanfaat bagi mereka dan bahwa perbedaan utama ada pada cara dimana mengakses informasi yang buruk dan memanfaatkan informasi dibandingkan dengan informasi yang kaya. Anggota masyarakat jarang mencari informasi dari luar masyarakat atau dari saluran komunikasi formal, sedangkan lebih kasual kebutuhan informasi, semakin kecil kemungkinan bahwa orang itu akan melampaui lingkaran kehidupan terdekat mereka (keluarga dan lingkungan) untuk mencari informasi.

2. Perspektif Ilmu Kognitif

Fokus pada perbedaan kognitif individu dalam memproses dan akuisisi informasi. Studi ini menunjukkan bahwa kepentingan pribadi, keterampilan informasi, media preferensi, partisipasi dalam urusan komunitas dan komunikasi interpersonal semua mempengaruhi efisiensi pengolahan informasi dan efek asimilasi informasi. Hal ini, pada gilirannya, memutuskan mana informasi-

kaya dan informasi-miskin, spektrum seseorang akan berlokasi. Seperti dicatat oleh studi, miskin informasi terutama dicirikan oleh kurangnya kesadaran informasi, kurangnya motif untuk mengakses informasi dan ketidakcukupan dalam keterampilan informasi.

Perbedaan kognitif antara orang dengan pendidikan tinggi dan mereka yang berpendidikan rendah memberikan dampak pada perbedaan asimilasi informasi. Studi menunjukkan bahwa peserta dari kedua kelompok membayar tingkat yang sama perhatian ke televisi laporan berita, tetapi mereka tidak menampilkan pengakuan yang sama dalam memori fakta. Selain itu, peserta kelompok pendidikan tinggi tampaknya secara fisiologis lebih terangsang oleh berita (yang berarti mereka lebih biologis waspada dalam mempersiapkan untuk memproses informasi) dibandingkan dengan kelompok pendidikan yang lebih rendah.

3. Overview

Seperti terlihat dari gambaran di atas, penulis mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab untuk pemisahan dan ketimpangan informasi tampaknya telah ditangani berdasarkan faktor potensial pada tiga tingkatan yang berbeda: tingkat makro (masyarakat), tengah (masyarakat) dan tingkat mikro (Individu). Pada tingkat makro ekonomi, penelitian politik menunjukkan bahwa ketimpangan informasi dan kemiskinan yang erat terkait dengan komponen kelembagaan masyarakat yang mengalokasikan sumber daya informasi yang berbeda bagian masyarakat sesuai dengan ekonomi dan

kekuasaan politik yang setiap bagian bisa berbeda; di tengah tingkat, berdasarkan studi di acara konstruktivisme sosial bahwa masyarakat, khususnya yang kurang beruntung dan masyarakat pinggiran, hidup dalam terisolasinya dunia informasi didefinisikan oleh norma-norma sosial bersama, dan bahwa orang di dalam dunia mereka sendiri jarang usaha untuk mencari informasi dari dunia luar, yang menyebabkan informasi diperkuat masyarakat miskin yang kurang beruntung. Di tingkat mikro, studi berbasis kognisi mengungkapkan bahwa orang-orang berbeda dalam kemampuan mereka untuk memproses dan memahami informasi dan akibatnya banyak perbedaan dalam bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari informasi yang mereka terima.

Melengkapi satu sama lain, penjelasan pada waktu yang berbeda tingkat bersama-sama tampaknya menunjukkan bahwa, dalam masyarakat kontemporer, arus informasi dari kolam sumberdaya informasi masyarakat bagi masyarakat yang kurang beruntung dan individu tampaknya akan terhambat oleh lapisan faktor: pertama oleh faktor-faktor politik dan ekonomi, dengan budaya dan faktor sosial, dan akhirnya oleh faktor-faktor pribadi. Kemiskinan dunia informasi yang dihasilkan cenderung didiami oleh orang-orang yang dirugikan dalam semua aspek dan yang, paradoks, yang membutuhkan informasi besar untuk memperbaiki kondisi mereka.

Rekomendasi Kebijakan

Dalam penulisan ini mencakup rekomendasi akan beragam kebijakan dan tindakan, mulai dari

konstruksi informasi infrastruktur, pilihan teknologi, informasi literasi pelatihan, reformasi kelembagaan dan transformasi budaya, untuk menggunakan investasi asing, pembukaan pasar, penguatan hak kekayaan intelektual, kerjasama internasional, dan publik-swasta sektor kerjasama.

Terlepas dari sejumlah studi yang mengusulkan rekomendasi mereka dari perspektif teknis terfokus (yaitu dengan membandingkan fitur-fitur teknologi yang berbeda dan kondusif untuk layanan universal dalam konteks tertentu), sebagian besar rekomendasi tampaknya secara eksplisit maupun implisit didukung oleh ideologi politik dan kepentingan strategis yang sejajar dengan peneliti. Hubungan antara solusi yang diusulkan dan kepentingan strategis pengusul jelas ditunjukkan di Houston dan (2002) konten Erdelez's studi analisis bahwa perbedaan yang signifikan antara solusi yang ditawarkan oleh sektor pendidikan, industri digital dan sektor usaha non-digital. Dalam studi ini, empat kelompok rekomendasi kebijakan tampaknya telah muncul, sesuai dengan empat pandangan tersebut politik. Yang pertama (Compaine, berpendapat bahwa TIK, seperti penemuan teknologi lainnya di masa lalu, akan menyebar dengan kekuatan pasar untuk sebagian besar masyarakat, dan kesenjangan digital saat ini, jika ada, hanya akan ada sebagai fenomena sementara; tidak ada kebutuhan untuk intervensi pemerintah. Pandangan ini berpendapat, bila pemerintah campur tangan dengan kesenjangan digital berarti pemerintah yang akan harus mengalihkan biaya menggunakan ICT dari satu bagian penduduk lain, hal ini dengan sendirinya

menyebabkan ketidakadilan sosial, bukan menghapusnya. Rekomendasi dalam pandangan ini mengusulkan bahwa peran pemerintah adalah untuk memfasilitasi kerja pasar dan mempromosikan kompetisi, negara-negara berkembang, khususnya, perlu untuk mempercepat deregulasi sektor telekomunikasi mereka dan membuka pasar internal mereka untuk investasi asing, mereka juga perlu memperketat perlindungan hak kekayaan intelektual.

Yang kedua adalah (Chowdary, 2002; Cooper dan Kimmelman, 2001; Dasgupta et al, 2005;. Genus dan Nor, 2005; Hill dan Dhanda, 2004, Mariscal, 2005; Mathur dan Ambani, 2005, Nicholas, 2003; Parker, 2000; Roycroft dan Anantho, 2003; Wong, 2002; Zhang dan Wolff, 2004) yang berpendapat bahwa kesenjangan digital tidak akan berkurang tanpa campur tangan pemerintah dan masyarakat dan bahwa pelebaran kesenjangan digital menyajikan hambatan serius terhadap pembangunan. Kelompok ini setuju dengan kelompok pertama bahwa dalam hal itu juga mengemban peran kekuatan pasar dalam menghilangkan kesenjangan digital dan mengusulkan kebijakan seperti promosi persaingan, penguatan perlindungan hak cipta, insentif pajak/tarif berkurang pada barang dan jasa TIK, pengembangan teknologi taman dll, semua dengan maksud untuk memfasilitasi fungsi pasar. Namun, tidak seperti kelompok pertama, kelompok ini percaya bahwa tingkat tertentu campur tangan pemerintah, bantuan internasional, sektor bisnis re-orientasi dan dukungan masyarakat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan. Karena itu

merekomendasikan tindakan pemerintah dan non-pemerintah seperti memperbaiki infrastruktur informasi di daerah terpencil, menyediakan pusat TIK di komunitas miskin, mensponsori perpustakaan dan sekolah untuk menyediakan akses internet gratis atau biaya rendah, dan menyediakan tingkat yang sesuai teknologi dan layanan yang sesuai dengan kapasitas ekonomi pasar yang berbeda. Berkaitan dengan kebijakan yang ada, kelompok ini mendukung kebijakan pemerintah, yakni mengandalkan sektor swasta untuk menyediakan infrastruktur informasi nasional dan internasional di satu sisi, dan menyediakan subsidi untuk lembaga-lembaga publik dan sektor dirampas untuk akses internet pada sisi lain.

Kelompok ketiga, diwakili oleh studi Berman dan Tettey (2001), Birdsall (1997, 2000), Bishop et al. (2001), Buchanan (1999), Carvin et al. (2001), Clark dan Gorski (2001, 2002), Clark et al. (2004), Colby (2001), Couldry (2003), Golding dan Murdock (2001), Hacker dan Mason (2003), Hongladarom (2004), Houston dan Erdelez (2002), James (2005), Korac-Kakabadse et al. (2000), Kvasny dan Keil (2006), Lentz (2000), McSorley (2003), Meredyth (2000), Mitchell (2002), Molina (2003), Parayil (2005), Servon dan Nelson (2001) dan Shuler (1999), adalah penting dari kedua keyakinan konservatif kelompok pertama bahwa kesenjangan digital akhirnya akan hilang melalui kerja pasar dan optimisme teknologi, sedangkan kelompok kedua meyakini bahwa kesenjangan digital dapat dikurangi dengan menyediakan teknologi untuk kaum miskin. Rekomendasi yang diusulkan oleh penelitian dari kelompok

ini, oleh karena itu, cenderung untuk menekankan kebutuhan untuk mengatasi isu-isu sosial, politik dan budaya yang terkait dengan kesenjangan digital. Mereka mendesak pemerintah untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam memastikan akses Internet adil misalnya melalui, sektor publik terlibat dalam penyediaan infrastruktur dan jasa, pendidikan keterampilan ICT warga, eksploitasi internet untuk informasi warga negara (sebagai lawan dari informasi komersial), dll Mereka juga mendesak masyarakat internasional untuk mengembangkan mekanisme pertukaran informasi yang adil dan tidak adil antara negara maju dan berkembang, untuk menghormati dan melestarikan warisan budaya dan pengetahuan tradisional, dan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan khusus negara-negara berkembang dalam konteks mereka mengkritik kebijakan konservatif pemerintahan untuk berbagai kekurangan: ketergantungan pada sektor swasta untuk infrastruktur/penyediaan layanan, perspektif narroweconomic dalam menilai dampak kesenjangan digital, dan pasif dalam mengatur isi komersial jaringan. Mereka sangat kritis terhadap wacana peluang digital, berpendapat bahwa munculnya peluang digital sebagai pengganti dari wacana kesenjangan digital menempatkan spin menipu positif tentang dampak TIK untuk semua bangsa dan semua sektor masyarakat (Couldry, 2003; McSorley, 2003 ; Meredyth, 2000; Strover, 2003).

Kelompok keempat merekomendasikan kebijakan dengan menunjukkan studi seperti Alden (2003), Light (2001), Menou (2001) dan Wade

(2002). Studi-studi ini terhadap setiap kegiatan atau kebijakan yang hype kesenjangan digital, berpendapat bahwa hal itu akan mengalihkan perhatian pemerintah dari hal-hal yang lebih mendesak, menyebabkan penyalahgunaan sumber daya publik dan meningkatkan ketergantungan teknologi dari negara-negara berkembang di negara maju.

Pilihan Kebijakan

Feather mencatat bahwa ketidaksetaraan informasi adalah salah satu isu politik utama masyarakat informasi. Suatu hal yang penting adalah cenderung menempatkan diri di tengah-tengah kebijakan pemerintah. Namun, jika pembuat kebijakan dan masyarakat umum untuk melihat komunitas riset dukungan intelektual dalam pengembangan kebijakan dan konsultasi, mereka mungkin akan menjadi lebih heran, karena interpretasi yang berbeda ketidaksetaraan dalam informasi, bertentangan penilaian besar dan lintasan dan kesimpulan pada berbagai faktor penyebab yang telah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang cocok, masing-masing menunjuk ke arah yang agak berbeda. Ketidaksepakatan dalam rekomendasi kebijakan antara yang pertama dari dua komunitas peneliti, dengan informasi untuk membagi masyarakat dengan penekanan lebih besar pada penyebaran informasi dan menggunakan kesenjangan digital dan komunitas lebih pada infrastruktur Informasi dan akses.

Meskipun beberapa peneliti memuji mendaftar atas partisipasi masyarakat sipil (Selian, 2004) dan untuk memungkinkan negara-negara miskin

untuk memberikan peran kepemimpinan dalam artikulasi mekanisme dan langkah-langkah untuk memerangi kesenjangan digital (Klein,

Selain menawarkan rekomendasi kolektif yang berbeda dan kadang-kadang bertentangan dari dua komunitas penelitian dan perspektif teoritis yang berbeda dan sudut pandang yang juga memiliki kelemahan mereka sendiri yang melekat sebagai dampak mengerahkan perhatian kebijakan. Pemerintah cenderung mengabaikan rekomendasi dari komunitas peneliti tersebut, karena bahwa peneliti sering menawarkan rekomendasi yang tidak terlalu menyenangkan kepada pemerintah. Misalnya kelompok informasi dari ekonomi politik menjadi sangat kritis terhadap kebijakan informasi berdasarkan logika kapitalis, sering menawarkan rekomendasi menentang daripada pelengkap atau mengubah kebijakan pemerintah saat ini di negara-negara barat, komunitas tersebut juga sering menyerukan perubahan kelembagaan untuk pertukaran informasi yang mendasar hubungan dunia mengancam struktur kekuasaan saat ini. Disisi lain kelompok konstruktivis sosial cenderung untuk mengusulkan rekomendasi tentang perubahan budaya, oleh karena itu sering gagal untuk menawarkan perbaikan cepat untuk masalah seperti yang disyaratkan oleh pemerintah.⁶

Dibandingkan dengan komunitas membagi informasi, rekomendasi kebijakan dari kesenjangan digital masyarakat tampaknya memiliki

⁶<http://www.borneotribune.com/headline/dim-menjawab-ketimpangan-informasi.html> ,di download tanggal 7 Januari 2012.

dampak yang lebih besar pada pemerintah dan sektor bisnis. Namun, sebagaimana telah disebutkan sekilas, komunitas ini memiliki kelemahan sendiri ketika datang untuk membuat kebijakan. Terdapat dalam komunitas ini jauh lebih bertentangan rekomendasi kebijakan dari dalam komunitas membagi informasi. Misalnya, Compaine's merekomendasikan bahwa pemerintah harus melangkah mundur dan membiarkan pasar menghapus TIK secara bertahap, Wong merekomendasikan yang harus ada publik yang lebih besar dan kerjasama sektor swasta, dan Golding dan rekomendasi Murdock's bahwa pemerintah yang harus mengambil lebih besar peraturan dan keuangan peran dalam menanggulangi kesenjangan digital yang sesungguhnya.

Masing-masing rekomendasi ini tampaknya berasal dari penelitian empiris fenomena kesenjangan digital dan masing-masing belum menunjuk ke sebuah arah kebijakan yang tanpa kompromi tidak termasuk kemungkinan yang lain. Selain itu, sebagai hubungan antara komunitas Administration ICT kebijakan dan beberapa penelitian kesenjangan digital (Lihat Couldry, 2003 untuk analisis mendalam tentang ini) menunjukkan, karena pengaruh ideologi politik yang berat ini penelitian masyarakat, setidaknya beberapa rekomendasi kebijakan kemungkinan besar akan diarahkan untuk mendukung pemerintah kebijakan disukai bukan untuk menginformasikan pilihan kebijakan pemerintah.

Dalam ketimpangan informasi tersebut merugikan masyarakat untuk berbagi informasi, atau kelemahan dari

masyarakat kesenjangan digital. Namun, bagaimanapun, beralasan untuk mengharapkan kapasitas baru untuk itu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan.

Pertama, dengan meletakkan penekanan pada yang lebih seimbang dari satu masyarakat untuk sekarang harus dicapai pada pesan dan media, aspek manusia dan teknologi, sosial dan ekonomi, sebuah wacana baru akan lebih mungkin untuk memimpin komunitas riset untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pemikiran holistik, kedua, untuk menarik kekuatan kesenjangan informasi kesadaran etika publik dan hubungan erat dengan sektor publik di satu sisi, dan kesadaran masyarakat kesenjangan teknologi digital dan hubungan erat dengan informasi industri di sisi lain, wacana baru dapat memfasilitasi perdebatan kebijakan dan saling pengertian di antara berbagai pemangku kepentingan yang lebih besar. Sebagai contoh kerangka yang disebutkan sebelumnya oleh Kim dan Kim (2001). Meskipun kerangka jauh dari model yang sempurna dari sebuah wacana baru, telah membantu Kim dan Kim untuk melihat bahwa perubahan dalam ketidaksetaraan informasi dari satu bentuk ke yang lain, fokus kebijakan perlu mengambil garis berbeda (Kim dan Kim menyebut fokus masing-masing 'instrumental, interaksional dan simbolik') untuk memungkinkan aspek yang berbeda dari kesenjangan (pesan vs media) dan peran sektor yang berbeda (sektor publik versus sektor industri) untuk datang ke kedepan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transfer teknologi dalam era globalisasi merupakan

penyumbang ketimpangan informasi. Adapun hal yang dapat dilakukan antara lain:

1. Negara dunia ke-3 bergabung dengan Negara yang lebih besar atau Negara yang lebih maju.
2. Negara dunia ke-3 harus mempunyai kekuatan. Dalam artian, walaupun Negara itu kecil cakupan luas wilayahnya, namun dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki mampu memberikan kekuatan bagi Negara tersebut.
3. Mengajukan kepercayaan diri yang radikal untuk mempertahankan diri.

KESIMPULAN

Ketidaksetaraan informasi adalah salah satu isu politik utama masyarakat informasi. Suatu hal yang penting adalah cenderung menempatkan diri di tengah-tengah kebijakan pemerintah. Namun, jika pembuat kebijakan dan masyarakat umum untuk melihat komunitas riset dukungan intelektual dalam pengembangan kebijakan dan konsultasi, mereka mungkin akan menjadi lebih heran, karena interpretasi yang berbeda ketidaksetaraan dalam informasi, bertentangan penilaian besar dan lintasan dan kesimpulan pada berbagai faktor penyebab yang telah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang cocok, masing-masing menunjuk ke arah yang agak berbeda. Ketidaksepakatan dalam rekomendasi kebijakan antara yang pertama dari dua komunitas peneliti, dengan informasi untuk membagi masyarakat dengan penekanan lebih besar pada penyebaran informasi dan menggunakan kesenjangan digital dan komunitas lebih pada infrastruktur

Informasi dan akses. Dalam ketimpangan informasi tersebut merugikan masyarakat untuk berbagi informasi, atau kelemahan dari masyarakat kesenjangan digital. Namun, bagaimanapun, beralasan untuk mengharapkan kapasitas baru untuk itu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzali Amri, Antropologi dan Pembangunan Indonesia. Jakarta: Kencana. 2005.
- Rudy May, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional. Bandung: Refika Aditama 2005.
- Mulyana Dedy, Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu. Bandung: Simbiosis Reka Tama Media. 2007.
- Husaini, Adian, Wajah Peradaban Barat; dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal, Jakarta : Gema Insani Press, 2005.
- Ilyas, Yunahar, "Globalisasi dan Tantangan Dakwah", dalam 'Ulumuddin Digital Journal Al-Manär, Edisi I /2004.
- Madjid, Abd, Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi, Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- <http://duniabreaker.blogspot.com/2011/02/memahami-ketimpangan-informasi-membuat-htmldownload-tanggal-7-Januari-2011>.
- <http://www.borneotribune.com/headline/din-menjawab-ketimpangan-informasi.html.didownload-tanggal-7-Januari-2011>.